

PELUANG DAN TANTANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN EKONOMI ISLAM DALAM KONTEKS TREND EKONOMI GLOBAL

Nur Kholis

Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
e-mail: nur_kholisyes@yahoo.com

Abstract

The development of Islamic economy is currently very rapidly in Indonesia, particularly Islamic banking. Of course, this is due to start his conscious development of the community against the adverse effects of western capitalist economies. Even though, so the high growth of Islamic banking is not accompanied by high quality human resources. This paper tries to dig deeper into the role of institutions and educational institutions in preparing human resources "insani". Prepared with human resources are good then the sharia Islamic economy will be able to exist and grow amid a global economy

Keyword: *Islamic banking, agencies/institutions, human resources, global economy*

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan yang kini dihadapi industri keuangan syariah sebagai salah satu wujud praktik ekonomi Islam di dunia, termasuk Indonesia adalah ketersediaan SDM berkualitas. Terus berkembangnya industri keuangan dan perbankan syariah mendorong meningkatnya kebutuhan SDM berkualitas. Bank Indonesia pernah menyatakan untuk mengejar pangsa pasar perbankan syariah menjadi lima persen, Indonesia kekurangan tenaga kerja sekitar 40 ribu.¹

Persoalan kedua adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan syariah. Hal tersebut terlihat dari belum banyaknya masyarakat yang mengakses layanan perbankan syariah dibandingkan layanan perbankan konvensional.

Salah satu perusahaan konsultan manajemen terbesar dunia, AT Kearney melaporkan terbatasnya SDM berkualitas di sektor perbankan syariah akan menjadi kendala terbesar dalam mengembangkan industri tersebut. Terlebih, dengan terus berkembangnya industri perbankan syariah, maka tuntutan akan SDM baru berkualitas akan semakin besar. AT Kearney memprediksi industri perbankan syariah Timur Tengah dalam satu dekade mendatang membutuhkan sedikitnya sekitar 30 ribu SDM baru berkualitas.

Menurut Direktur Dow Jones Islamic Market Index (DJIM), Rushi Siddiqui, terbatasnya sumber daya juga terjadi di sisi

SDM pengawas syariah. Terlebih, kebutuhan akan SDM tersebut diprediksi akan terus meningkat sejalan dengan semakin banyaknya lembaga keuangan konvensional Barat yang mulai memasuki bisnis syariah.

Siddiqui menyebutkan, data terbaru Islamic Finance Information Service (IFIS) di London menunjukkan jumlah pakar syariah internasional saat ini sangat terbatas. Pada tahun 2006, hanya terdapat 187 pakar syariah internasional yang melakukan supervisi kesesuaian syariah bagi total 200 lembaga keuangan syariah di dunia. Sheikh Nizam Yaquby asal Bahrain misalnya mensupervisi hampir 40 lembaga keuangan syariah. Siddiqui menyebutkan, berdasarkan data tersebut, lembaga keuangan syariah dunia terbukti masih membutuhkan penambahan jumlah pakar syariah lebih banyak.

Saat ini, terdapat sekitar 300 lembaga keuangan syariah di dunia. Mereka tersebar lebih di 75 negara. Pada awal tahun lalu, nilai aset mereka diestimasi mencapai sekitar 300 miliar dolar AS. Nilai aset itu diproyeksi akan tumbuh cukup signifikan dalam beberapa tahun mendatang dipicu tingginya permintaan pasar atas produk keuangan syariah. Situs www.researchandmarkets.com, melansir hasil penelitian mengenai perkembangan keuangan syariah global. Berdasarkan penelitian itu, perbankan syariah merupakan industri keuangan di dunia dengan tingkat pertumbuhan paling cepat.² Walaupun demikian, jika dibanding

¹ Republika, 2 Mei 2007

² www.researchandmarkets.com, Jumat, 13 Juni 2008.

dengan lembaga keuangan konvensional masih sangat jauh market share-nya. Misalnya, di Indonesia market share perbankan Syariah masih di bawah 3 % dari perbankan nasional.

Akan tetapi, kebutuhan SDM ekonomi Islam yang benar-benar berkualitas merupakan kebutuhan pokok dan mendesak untuk mendorong pengembangan ekonomi Islam lebih kencang lagi. Untuk itu, eksistensi institusi pendidikan ekonomi Islam merupakan keniscayaan. Dalam makalah ini akan dipaparkan *demand* SDM ekonomi berkualitas, eksistensi dan masa depan institusi pendidikan ekonomi Islam dalam konteks perkembangan trend ekonomi global.

Trend Ekonomi Global

Era globalisasi (*the age of globalization*), dalam beberapa literature dinyatakan bermula pada dekade 1990-an.³ Era ini ditandai, diantaranya dengan adanya fenomena penting dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi dunia tidak hanya dibatasi oleh faktor batas geografi, bahasa, budaya dan ideologi, akan tetapi lebih karena faktor saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain.⁴ Dunia menjadi seakan-akan tidak ada batas, terutama karena perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Keadaan yang demikian melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan,⁵ terutamanya dalam upaya pengembangan ekonomi Islam.⁶

Proses globalisasi diperkirakan semakin bertambah cepat pada masa mendatang, sebagaimana dikemukakan oleh Colin Rose

bahwa dunia sedang berubah dengan kecepatan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehidupan masyarakat termasuk kehidupan hukum dan ekonominya menjadi semakin kompleks.⁷

Pada dasarnya sistem ekonomi menunjuk pada satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan tersebut terhadap produksi, konsumsi dan distribusi pendapatan.⁸ Karena itu, sistem ekonomi merupakan sesuatu yang penting bagi perekonomian suatu negara. Sistem ekonomi terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks, misalnya ideologi dan sistem kepercayaan, pandangan hidup, lingkungan geografi, politik, sosial budaya, dan lain lain.

Pada era global ini terdapat berbagai macam sistem ekonomi negara-negara di dunia. Meskipun demikian secara garis besar, sistem ekonomi dapat dikelompokkan pada dua kutub, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Sistem-sistem yang lain seperti *welfare state*, *state capitalism*, *market socialism*, *democratic socialism* pada dasarnya bekerja pada bingkai kapitalisme dan sosialisme. Akan tetapi, sejak runtuhnya Uni Soviet, sistem sosialisme dianggap telah tumbang bersama runtuhnya Uni Soviet tersebut. Oleh karena itu sistem ekonomi kapitalisme yang hingga kini masih menjadi sistem ekonomi kuat di dunia.

Sistem ekonomi kapitalis yang saat ini berkembang, memanglah tidak sama persis dengan pada masa awal lahirnya. Telah terjadi evolusi dalam proses perjalanan sistem kapitalis menuju ke arah yang lebih humanis dan memperhatikan etika, sebagaimana telah disinggung dalam pendahuluan artikel ini. Era ekonomi dewasa ini di era global sering disebut era ekonomi modern atau ekonomi baru (*the new economy*). Ekonomi Baru sebenarnya menyangkut keseluruhan industri (dalam arti luas) yang bersaing dalam tatanan dan cara baru. Ekonomi Baru bukan hanya menyangkut teknologi tinggi, tetapi lebih pada berinovasi dalam melakukan bisnis, terkait dengan produk (barang/jasa) dan sebagainya. Aktivitas produktif dalam Ekonomi Baru menghadapi isu

³ Globalization is accepted as one of the fundamental of the processes that characterize the contemporary world, a process leading towards an increasingly strong interdependence between increasingly large parts of the world. S. Parvez Manzoor. 2004. "Book Review 'Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity'" oleh Johan Meuleman (ed.). 2002. London: RoutledgeCurzon, dimuat dalam *Journal of Islamic Studies*, Vol. 15, No. 2, Mei 2004, Oxford: Oxford Centre for Islamic Studies, h. 280.

⁴ Jan Pronk. 2001. "Globalization: A Developmental Approach", dalam Jan Nederveen Pieterse (ed.), *Global Futures, Shaping Globalization*, London: Zed Books, h. 43.

⁵ Walter Leimgruber. 2004. *Between Global and Local*, Aldershot (England): Ashgate Publishing Limited, hh. 18-19.

⁶ Untuk mendapat penjelasan lebih lengkap tentang pengalaman dan respon umat Islam terhadap globalisasi, lihat Abdul Rashid Moten. 2005. "Modernization and The Process of Globalization: The Muslim Experience and Responses", dalam K.S. Nathan dan Mohammad Hashim Kamali (eds.), *Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategic Challenges for the 21st Century*, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, hh. 231-255.

⁷ Collin Rose dan Malcolm J. Nicholl. 1997. *Accelerated Learning for the 21st Century*. New York: Delacorte Press, h. 1.

⁸ Paul R Gregory dan Robert C Stuart. 1981. *Comparative Economic System*, Boston: Houghton Mifflin Company, h. 16.

dan karakteristik yang hampir serupa, yaitu cepat, global, berjangkauan, semakin dipengaruhi/ditentukan oleh pengetahuan, semakin sarat teknologi/inovasi.

Perbedaan Ekonomi Baru dengan ekonomi lama (sebelumnya) pada dasarnya lebih pada paradigma dalam melaksanakan atau mengelola dan mengembangkan aktivitas ekonomi. Ekonomi Baru sangat sarat dengan dinamika perubahan yang cepat, aktivitas yang seolah tanpa batas (*borderless*), dan jaringan yang menjadi pola hubungan keseharian yang menentukan bagaimana proses nilai tambah dilakukan, serta bagaimana keterkaitan dan daya saing dibangun dan dipertahankan. Terlebih penting lagi sebenarnya adalah bahwa pengetahuan (*knowledge*) dan inovasi dianggap sebagai pendorong utama (*the driving force*) bagi Ekonomi Baru. Kenyataan ini memang untuk sementara ini lebih signifikan terjadi di negara ekonomi maju.

Senapas dengan Ekonomi Baru, berkembang jargon lain yaitu ekonomi pengetahuan atau ekonomi berbasis pengetahuan. Ekonomi pengetahuan (*knowledge economy*) merupakan suatu ekonomi yang membuat penggunaan pengetahuan secara efektif untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Ini mencakup *tapping* pengetahuan asing, adaptasi dan menciptakan pengetahuan untuk kebutuhan-kebutuhan spesifik (World Bank Institute). Dalam definisi yang lain, Ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy/KBE*) pada dasarnya merupakan ekonomi di mana penciptaan (produksi), penyebaran (distribusi) dan pemanfaatan/pendayagunaan ilmu pengetahuan menjadi penggerak utama pertumbuhan, pengembangan kesejahteraan, dan penciptaan/perluasan lapangan kerja di semua industri/sektor ekonomi (McKeon dan Weir, 2000).

Istilah berbeda yaitu Ekonomi Baru, ekonomi pengetahuan, Ekonomi berbasis pengetahuan sebenarnya berbicara inti filosofis yang sama. Esensi penting dari paradigma Ekonomi Modern adalah bahwa (1) Pengetahuan merupakan satu di antara sumber daya terpenting dalam pembangunan; (2) Kemampuan inovasi semakin menentukan keberhasilan bisnis/ekonomi; (3) Kompetensi merupakan basis untuk fokus aktivitas produktif; (4) Jaringan/keterkaitan rantai nilai menjadi pola aktivitas ekonomi terbaik; (5) Faktor lokalitas semakin menentukan keunggulan dalam persaingan

global (keunggulan dalam tata persaingan global semakin ditentukan oleh kemampuan bersaing dengan bertumpu pada potensi terbaik lokal).⁹

CATATAN KEGAGALAN EKONOMI KAPITALIS DAN LAHIRNYA MAZHAB POSITIF EKONOMI GLOBAL

Kegagalan ilmu konvensional kapitalis dalam menciptakan keadilan sosial dan menyelesaikan persoalan manusia sudah tidak terbantah.¹⁰ Secara internasional hal itu dapat disimak melalui buku *The Death of Economics* karya Ormerod (1998), atau melalui buku *Economics as Religion* karya Nelson (2001). Sedangkan secara nasional, hal itu dapat disimak melalui buku *Ekspose Ekonomika* karya Sri-Edi Swasono (2005). Sesuatu yang menggembirakan adalah bahwa telah terjadi perkembangan yang positif dalam ilmu ekonomi, di mana banyak pakar ekonomi telah melakukan kritik tajam terhadap kegagalan ilmu ekonomi konvensional kapitalis dan menyumbangkan pemikirannya dengan mengemukakan ide-ide yang mengarah kepada perbaikan paradigma ilmu ekonomi menuju yang lebih baik, yaitu perhatian terhadap nilai-nilai moral, etik, dan keadilan sosial. Misalnya dikemukakan oleh Thomas Friedman ketika diadakan konferensi Davos, Agustus 1997 yang menghimpun para pemimpin dari seluruh dunia. Ia mengatakan yang artinya: "Serangan terhadap mereka yang akan membangun dunia pada basis satu dimensi, di mana perdagangan adalah segalanya, di mana hanya perhitungan-perhitungan finansial saja yang perlu, dengan mudah akan menemui serangan moral potensial terhadap globalisasi".¹¹

Amitai Etzioni menyatakan bahwa paradigma ilmu ekonomi neoklasik pada hakikatnya tidak hanya mengabaikan dimensi moral, tetapi juga menolak dimasukkannya moral ke dalam paradigmanya. Oleh karena itu perlu ada paradigma baru dalam ilmu ekonomi

⁹http://www.corebest.net/teori_model_metoda_dan_teknik_implementasi.htm, akses 24 September 2007

¹⁰ Sebagaimana dikutip Khursid Ahmad dari *New York Times*, 28 November 1993

¹¹ Sebagaimana dikutip oleh Khursid Ahmad dalam "Kata Pengantar" buku Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Khursid Ahmad (2001), "Kata Pengantar" dalam Umer Chapra. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Ikhwani Abidin Basri (terj.) Jakarta: Gema Insani Press, h. xvii.

yaitu perlunya dimasukkan nilai-nilai moral, karena hanya dengan cara itulah memungkinkan untuk mencari mana yang benar dan mana yang menyenangkan.¹²

Christofam Buarque,¹³ menyatakan bahwa kegagalan ilmu ekonomi dalam pandangannya terletak kepada pengabaian nilai-nilai sosial dan etika.¹⁴ Tujuan sosial telah dikesampingkan dan dipandang sebagai konsekuensi dari kemajuan teknik daripada sebagai tujuan peradaban. Sementara itu, nilai-nilai etika telah dipinggirkan. Perlu ada suatu perubahan fundamental dalam pendekatan, penyusunan kembali prioritas-prioritas secara total. Pendekatan yang dimaksudkan yaitu 1) suatu etika untuk melakukan redefinisi tentang tujuan peradaban. 2) suatu definisi baru tentang sasaran dan area kajian. 3) suatu landasan baru bagi ilmu ekonomi sebagai suatu disiplin.¹⁵

Timothy Gorringe menyatakan bahwa mereduksi manusia yang *homo sapiens* (makhluk bijaksana) dengan hanya *homo economicus* yang secara rasional memaksimalkan utiliti, bertindak berdasar *self interest* saja merupakan reduksi yang sangat telak terhadap nilai-nilai moral.¹⁶ Oleh karena itu perlu didirikan mahkamah internasional untuk keadilan ekonomi.¹⁷

Clive Hamilton mengungkapkan bahwa ilmu ekonomi berkait dan bersepat dengan kehidupan manusia, sedangkan manusia adalah makhluk yang berperasaan selain berakal, oleh karena itu ekonomi modern yang mengabaikan perasaan (moral/etika) dan *spirituality* merupakan kesalahan yang sangat telak. Memahami sesuatu dengan hanya berasaskan akal semata merupakan pemahaman yang tidak lengkap.¹⁸

Sejak terbitnya buku Max Weber *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* (1904-1905) orang yakin adanya hubungan erat antara (ajaran-ajaran) agama dan etika kerja, atau antara penerapan ajaran agama dengan pembangunan ekonomi. Weber memang mulai dengan analisis ajaran agama Protestan (dan Katolik), meskipun menjelang akhir hayatnya dibahas pula agama Cina (1915, Taoisme dan Confucianisme), India (1916 Hindu dan Budha), dan Yudaisme (1917).¹⁹

Sementara Kurt W. Rothschild memberikan salah satu metode penyelesaian problem etika dalam ekonomi. Beliau menyatakan bahwa *fairness* (sebagai salah satu kategori etika) dapat menjadi jembatan penghubung antara keadilan dan efisiensi dalam ilmu ekonomi. Walaupun mungkin akan terjadi penyimpangan yang sedikit dari yang diidealkan, akan tetapi konflik dasar antara nilai-nilai etika dan ekonomi hanya dapat didamaikan dengan baik melalui cara ini.²⁰

Lain halnya dengan Edward E. Zajac, dalam buku *Political Economy of Fairness*, beliau menjelaskan beberapa teori keadilan ekonomi baik yang bersifat normatif maupun positif ekonomi seperti *John Rawls' Theory of Justice*, *Robert Nozick Theory of superfairness* (normatif) dan *Perceived Economic Justice in Public Utility Regulation* (positif) dan sebagainya. Perbincangan dalam buku ini selalu mengkaitkan antara makro dan mikro ekonomi, karena sumber persoalan moral dalam ekonomi, di antaranya karena tidak mesranya *link* antara makro dan mikro ekonomi. Ini seperti telah banyak dikritik tentang pembagian makro dan mikro itu tidak tuntas.²¹

Sehubungan dengan banyaknya kritik terhadap ekonomi konvensional kapitalistik, saat ini telah muncul berbagai mazhab ekonomi positif kritis,²² diantaranya:

1. *Grant Economics* yang menyatakan bahwa perilaku *altruistic* tidak mesti dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap ra-

¹² Amitay Etzioni. 1988. *The Moral Dimension: Towards a New Economics* (New York: McMillan, h. ix-x).

¹³ Christofam Buarque. 1993. *The End of Economics: Ethics and Disorder of Progress*. London, Zed Books, h. xi.

¹⁴ Menurut Didin Hafidhuddin, kehancuran system ekonomi saat ini kerana paradigma berpikir kapitalis dan sosialis yang telah menjadikan hawa nafsu manusia sebagai pengendali aktiviti ekonominya, bukannya moral, etika dan akhlak. Lihat Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, h. 67.

¹⁵ Christofam Buarque. 1993. *op.cit.*, h. xii

¹⁶ Timothy Gorringe. 1999. *Fair Shares: Ethics and The Global Economy*. Slovenia: Thames & Hudson, h. 31.

¹⁷ *Ibid.*, h. 101

¹⁸ Clive Hamilton. 1994. *The Mystic Economist*. Australia: Hamilton, h. 6-7. Lihat pula Masudul Alam C. 1989. *The Paradigm of Humanomics*. Bangi: UKM

¹⁹ Mubyarto. 2002. "Penerapan Ajaran Ekonomi Islam Di Indonesia" dalam Jurnal Ekonomi Pancasila, Th. I - No. 1 - Maret 2002, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_1/artikel_4.htm

²⁰ Kurt W. Rothschild. 1993. *Ethics and Economic Theory*. Cambridge: Edward Elgar, h. 152

²¹ Edward E. Zajac. 1995. *Political Economy of Fairness*. London: MIT Press

²² M.B. Hendrie Anto. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: EKONISIA, h. 16

- sionaliti. Perlu ada integrasi antara *self interest* dan *altruisme*. Menyamakan atau menyederhanakan perilaku rasional hanya dengan mementingkan diri sendiri adalah tidak realistik.
2. Ekonomi *humanistic* yang menekankan perlunya pembentukan asas-asas humanismenya untuk mendorong kesejahteraan manusia dengan mengakui dan mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dasar. Mazhab ini tidak menganut utilitarianisme kuno tetapi psikologi *humanistic*.
 3. Ilmu ekonomi sosial yang mencakup usaha untuk revolusi teori ekonomi dipadukan dengan pertimbangan-pertimbangan moral. Menurut Amartya Sen (2001), menjauhkan ilmu ekonomi dari etika berarti telah mengerdilkan ilmu ekonomi *welfare* dan juga melemahkan basis deskriptif dan prediktif ilmu ekonomi. Hausman, salah satu pendukung paham ini, suatu perekonomian yang secara aktif melakukan kritik diri sendiri dengan aspek-aspek moral akan menjadi lebih menarik, lebih bersinar, dan lebih bermanfaat.
 4. Ilmu ekonomi institusional yang beranggapan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai lembaga yang saling berkaitan seperti sosial, ekonomi, politik, dan agama.

Kesulitan yang dihadapi oleh ilmu ekonomi konvensional telah diuji oleh sejumlah pakar ekonomi terkemuka dalam suatu kajian, *Economics in The Future: Towards a New Paradigm*.²³ Konsensus yang muncul dari buku ini adalah bahwa yang diperlukan untuk menyelamatkan ilmu ekonomi dari krisis yang sedang dialaminya, bukanlah dengan melakukan penafsiran teori ini atau teori itu atau melakukan perubahan-perubahan dalam paradigma ilmu ekonomi, tetapi yang diperlukan adalah mengubah paradigma itu sendiri dan bergerak menuju paradigma baru di mana problem-problem ekonomi tidak dikaji secara terpisah, tetapi dikaji dalam konteks keseluruhan sistem sosial, di mana ide-ide, visi masyarakat, dan nilai-nilai moral tidak disembunyikan, tetapi mendapatkan tempat dalam parameter yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan

ekonomi.²⁴ Perekonomian modern telah gagal untuk menjamin keadilan distributif, pertumbuhan yang berkesinambungan, pembangunan manusia yang seimbang, dan keharmonisan sosial. Hubungan antara nilai-nilai moral, keputusan ekonomi dan gelagat individu telah mengalami goncangan pada masa ekonomi konvensional kapitalis.

Menurut Umar Chapra,²⁵ revolusi ilmiah dalam ekonomi konvensional tidak komplis sehingga menyebabkan tiadanya mata rantai yang tegas antara mikroekonomi dan makroekonomi. Kurangnya mata rantai penghubung antara makroekonomi dan mikroekonomi telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para ahli ekonomi. Justeru dalam kenyataannya seakan-akan terjadi pertentangan antara makroekonomi dan mikroekonomi. Analisis mikroekonomi yang didasarkan kepada kebebasan individu berlebihan memberi perhatian lebih kepada efisiensi dengan *pareto*, tetapi tidak memperhatikan realisasi tujuan-tujuan makroekonomi yang didasarkan kepada pandangan dunia agama, yang menuntut pengengkangan kepentingan diri sendiri.

Dalam konteks problem tersebut, nilai-nilai moral/etika mempunyai kemampuan membantu tugas ini, karena ia bisa dipergunakan untuk menciptakan keharmonisan sosial dengan cara mereduksi kesenjangan antara kepentingan individu dan sosial dalam mendorong penggunaan sumber-sumber daya langka selaras dengan keperluan untuk mewujudkan tujuan.²⁶

Pasar tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas itu. Pasar perlu dilengkapi dengan nilai-nilai moral yang membantu mengarahkan preferensi individu supaya selaras dengan tujuan-tujuan *humanitarian*. Tujuan yang sedemikian, sulit dicapai tanpa adanya reformasi pada tingkat

²³ Sebagaimana dikutip Khursid Ahmad dalam "Kata Pengantar" buku Umar Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. *op.cit.*, h. xix

²⁴ Lihat pula pendedahan Peter Koslowski. 1993. "The Business of Business is Ethical Business" dalam Peter Koslowski dan Shionoya. 1993. *The Good and The Economical, Ethical Choice in Economics and Management*. London: Springer-Verlag, h. 4

²⁵ Umar Chapra. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam/The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Ikhwani Abidin Basri (terj.) Jakarta: Gema Insani Press, h. 33

²⁶ Untuk mendapatkan maklumat lebih lengkap tentang penggunaan sumber-sumber daya langka agar selaras dengan keperluan untuk mewujudkan tujuan pengeluaran dalam Islam, lihat Rustam Effendi. 2003. *Produksi dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.

individu dan sosial yang seirama dengan nilai-nilai moral.²⁷

Persoalannya adalah darimana nilai-nilai moral dalam ekonomi itu diambil, agar siapapun yang melanggarnya dapat dihukum. Apakah ekonomi sosial dan beberapa mazhab positif lainnya dapat menyediakannya? Apakah dari moralitas sosial? Mungkin jawabannya adalah tidak. Karena moralitas sosial bergantung kepada standar yang disepakati sebagai konsensus yang diterima sebagai aksioma yang hampir tidak bisa didiskusikan lagi. Utilitarianisme dan kontrak sosial tidak mempunyai potensi dapat menyediakan nilai-nilai yang diterima oleh semua orang.

Oleh karena itu, perbincangan tentang sumber nilai ini membawa kepada satu pembahasan tentang ekonomi Islam, baik yang berhubungan dengan paradigma, tujuan dan metode. Ini bukan bermakna akan menghapus teori-teori dan karya yang *sophisticated* dalam ekonomi konvensional, akan tetapi menyempurnakan revolusi ilmiah yang dilakukan oleh ilmu ekonomi konvensional.²⁸ Kenapa ekonomi Islam? Jawaban ringkasnya karena peluang untuk menciptakan suatu konsensus dalam dunia muslim lebih besar jika bahasan masalah dilakukan dalam kerangka pandangan dunia Islam.

EKONOMI ISLAM: TREND BARU YANG UNIVERSAL

Tidak bisa dipungkiri, bahwa sebutan ekonomi Islam melahirkan kesan yang beragam. Bagi sebagian kalangan, kata "Islam" memposisikan Ekonomi Islam pada tempat yang sangat eksklusif, sehingga menghilangkan nilai kefitrahannya sebagai tatanan bagi semua manusia (*rahmatan lil'alamin*). Bagi lainnya, ekonomi Islam digambarkan sebagai ekonomi hasil racikan antara aliran kapitalis dan sosialis, sehingga ciri khas spesifik yang dimiliki oleh Ekonomi Islam itu sendiri hilang.

Umar Chapra menyebut ekonomi Islam dengan Ekonomi Tauhid. Tapi secara umum dapat dikatakan sebagai *divine economics*. Cerminan watak "Ketuhanan" ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya -- sebab pelakunya pasti manusia -- tetapi pada aspek aturan atau sistem yang harus dipedomani oleh

para pelaku ekonomi. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah, dan kepadaNya (kepada aturanNya) dikembalikan segala urusan.²⁹

Sebagai ekonomi yang ber-Tuhan maka Ekonomi Islam -- meminjam istilah dari Ismail Al Faruqi -- mempunyai sumber "nilai-nilai normatif-imperatif", sebagai acuan yang mengikat. Dengan mengakses kepada aturan Ilahiah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.

Ekonomi Islam pernah tidak populer sama sekali. Kepopuleran ekonomi Islam bisa dikatakan masih belum lama. Oleh karena itu, sering muncul pertanyaan, apakah ekonomi Islam adalah baru sama sekali? Jika melihat pada sejarah dan makna yang terkandung dalam ekonomi Islam, ia bukan sistem yang baru. Argumen untuk hal ini antara lain:

1. Islam sebagai agama samawi yang paling mutakhir adalah agama yang dijamin oleh Allah kesempurnaannya, seperti ditegaskan Allah dalam surat Al-Maidah (5):3. Di sisi lain, Allah SWT juga telah menjamin kelengkapan isi Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia yang beriman dalam menjalankan perannya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam firmannya QS Al-An'am (6):38,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ
إِلَّا أُمَّةٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

2. Sejarah mencatat bahwa umat Islam pernah mencapai zaman keemasan, yang tidak dapat disangkal siapapun. Dalam masa itu, sangat banyak kontribusi sarjana muslim yang tetap sangat diakui oleh semua pihak dalam berbagai bidang ilmu sampai saat ini, seperti matematika, astronomi, kimia, fisika, kedokteran, filsafat dan lain sebagainya-

²⁷ Umer Chapra. 2001. *op.cit.*, h. 34

²⁸ *Ibid.*, h. 44

²⁹ QS Ali Imran: 109.

nya. Sejarah juga membuktikan, bahwa sulit diterima akal sehat sebuah kemajuan umat dengan begitu banyak kontribusi dalam berbagai lapangan hidup dan bidang keilmuan tanpa didukung lebih awal dari kemajuan di lapangan ekonomi.

3. Sejarah juga mencatat banyak tokoh ekonom muslim yang hidup dan berjaya di zamannya masing-masing, seperti Tusi, Al-Farabi, Abu Yusuf, Ibnu Taimiyyah, Al-Maqrizi, Syah Waliyullah, Ibnu Khaldun dan lain-lain.³⁰ Bahkan yang disebut terakhir (Ibnu Khaldun) diakui oleh David Jean Boulakia³¹ sebagai berikut: *“Ibn Khaldun discovered a great number of fundamental economic notions a few centuries before their official births. He discovered the virtues and the necessity of a division of labor before (Adam) Smith and the principle of labor before Ricardo. He elaborated a theory of population before Malthus and insisted on the role of the state in the economy before Keynes. The economist who rediscovered mechanisms that he had already found are too many to be named.”*

Ketiga argumen dan indikator di atas dapat dipakai sebagai pendukung yang amat meyakinkan bahwa sistem ekonomi Islam bukanlah hal baru sama sekali. Namun patut diakui bahwa sistem yang pernah berjaya ini pernah tenggelam dalam masa yang cukup lama, dan sempat dilupakan oleh sementara pihak, karena kuatnya dua sistem yang pernah berebut simpati dunia yaitu sistem kapitalisme dan sosialisme.

Sistem ekonomi Islam mengalami perkembangan sejarah baru pada era modern. Menurut Khurshid Ahmad, yang dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, ada empat tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam, yaitu:

1. *Tahapan Pertama*, dimulai ketika sebagian ulama, yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun

memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan sosio-ekonomi pada masa itu, mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu haram dan kaum muslimin harus meninggalkan hubungan apapun dengan perbankan konvensional. Masa ini dimulai kira-kira pada pertengahan dekade 1930-an dan mengalami puncak kemajuannya pada akhir dekade 1950-an dan awal dekade 1960-an. Pada masa itu di Pakistan didirikan bank Islam lokal yang beroperasi bukan pada bunga. Sementara itu di Mesir juga didirikan lembaga keuangan yang beroperasi bukan pada bunga bernama Mit Ghomir Local Saving. Tahapan ini memang masih bersifat prematur dan coba-coba sehingga dampaknya masih sangat terbatas. Meskipun demikian tahapan ini telah membuka pintu lebar bagi perkembangan selanjutnya.

2. *Tahapan kedua* dimulai pada akhir dasa warsa 1960-an. Pada tahapan ini para ekonom Muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Mereka melakukan analisis ekonomi terhadap larangan riba (bunga) dan mengajukan alternatif perbankan yang tidak berbasis bunga. Serangkaian konferensi dan seminar internasional tentang ekonomi dan keuangan Islam digelar beberapa kali dengan mengundang para pakar, ulama, ekonom baik muslim maupun non-muslim. Konferensi internasional pertama tentang ekonomi Islam digelar di Makkah al-Mukarromah pada tahun 1976 yang disusul kemudian dengan konferensi internasional tentang Islam dan Tata Ekonomi Internasional yang baru di London pada tahun 1977. Setelah itu digelar berbagai seminar tentang Ekonomi Moneter dan Fiskal serta Perbankan Islam di berbagai negara. Pada tahapan kedua ini muncul nama-nama ekonom muslim terkenal di seluruh dunia Islam antara lain Prof. Dr. Khurshid Ahmad yang dinobatkan sebagai bapak ekonomi Islam, Dr. M. Umer Chapra, Dr. M. A. Mannan, Dr. Omar Zubair, Dr. Ahmad An-Najjar, Dr. M. Nejatullah Siddiqi, Dr. Fahim Khan, Dr. Munawar

³⁰ M. Abdul Mannan. 1986. *Islamic Economics, Theory and Practice*. Cambridge: Hodder and Stoughton, The Islamic Academy; M. Umar Chapra. 2001. *What is Islamic Economics*, Jeddah: IRTI – IDB, h. 44.

³¹ David Jean C. Boulakia. 1971. “Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist”, *Journal of Political Economy*, Vol. 79, No. 5 (September/October), The University of Chicago, h. 1117-1118.

Iqbal, Dr. Muhammad Ariff, Dr. Anas Zaqra dan lain-lain. Mereka adalah ekonom muslim yang dididik di Barat tetapi memahami sekali bahwa Islam sebagai *way of life* yang integral dan komprehensif memiliki sistem ekonomi tersendiri dan jika diterapkan dengan baik akan mampu membawa umat Islam kepada kedudukan yang berwibawa di mata dunia.

3. Tahapan ketiga ditandai dengan upaya-upaya konkrit untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-riba baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor pemerintah. Tahapan ini merupakan sinergi konkrit antara usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, banker, para pengusaha dan para hartawan muslim yang memiliki kepedulian kepada perkembangan ekonomi Islam. Pada tahapan ini sudah mulai didirikan bank-bank Islam dan lembaga investasi berbasis non-riba dengan konsep yang lebih jelas dan pemahaman ekonomi yang lebih mapan. Bank Islam yang pertama kali didirikan adalah Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia.
4. Tahapan keempat ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integratif dan *sophisticated* untuk membangun keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat.

Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*).³² Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.³³ Dengan

demikian tujuan sistem ekonomi Islam adalah berkait dengan tujuan yang tidak hanya memenuhi kesejahteraan hidup di dunia saja (materialis) namun juga kesejahteraan hidup yang lebih hakiki (akhirat). Allah SWT sebagai puncak tujuan, dengan mengedepankan pencarian keridloan-Nya dalam segala pola perilaku sejak dari konsumsi, produksi hingga distribusi.³⁴

Ilmu ekonomi Islam mewakili suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh para ekonom muslim untuk melihat ulang keseluruhan persoalan ekonomi, termasuk metodologi ilmu ekonomi dengan suatu pandangan untuk mengantarkan suatu solusi baru terhadap persoalan-persoalan lama dan kini yang masih mengganggu.³⁵ Pendekatan ini masih dalam tahapan pertumbuhan awalnya, tetapi tidak diragukan lagi bahwa ia merupakan suatu permulaan yang menjanjikan masa depan yang sangat besar dan gemilang.³⁶

Umer Chapra, merupakan salah satu di antara pemikir muslim yang melakukan kajian sangat komprehensif mengenai masa depan ilmu ekonomi dalam pandangan Islam. Bukunya yang berjudul *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, telah memberikan kontribusi yang sangat positif dalam area ini. Beliau telah melakukan usaha yang besar untuk menghubungkan kembali ilmu ekonomi dengan moral dan keadilan, sehingga menegakkan disiplin untuk membela nilai-nilai kemanusiaan. Dalam buku tersebut, beliau melakukan kritik ilmiah dan simpatik terhadap ilmu ekonomi konvensional, dari sudut ekonomi maupun moral. Ia mengemukakan keterbatasan dan kelebihannya. Ia tidak hanya mengkritik tetapi juga memberikan solusi. Pendekatannya sangat kreatif dan positif. Beliau melihat di mana suatu telah bergerak ke arah yang salah dan mengajukan apa yang diperlukan untuk meluruskannya. Keprihatinannya tidak hanya terbatas kepada

³² Al-Quran menyebut kata *falah* dalam 40 tempat. *Falah* mencakup konsep kebahagiaan dalam dua dimensi yaitu dunia dan akhirat. Kebahagiaan dimensi duniawi, *falah* mencakup tiga aspek, yaitu: (1) kelangsungan hidup, (2) kebebasan dari kemiskinan, (3) kekuatan dan kehormatan. Sedangkan dalam kebahagiaan dimensi akhirat, *falah* mencakup tiga aspek juga, yaitu: (1) kelangsungan hidup yang abadi di akhirat, (2) kesejahteraan abadi, (3) berpengetahuan yang bebas dari segala kebodohan. *Falah* hanya dapat dicapai dengan suatu tatatan kehidupan yang baik dan terhormat (*hayah al-tayyibah*). Lihat M. B. Hendrie Anto. 2003. *op.cit.*, h. 7.

³³ Muhammad Akram Khan. 1989. "Methodology of Islamic Economics" dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.),

Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics, Petaling Jaya: Pelanduk Publications, h. 59; Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa et al. 2005. *op.cit.*, h. 53; M. B. Hendrie Anto. 2003. *op.cit.*, h. 7.

³⁴ Anas Zaqra'. 1989. "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare", dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications, h. 29-38.

³⁵ Rizal Yahya. 2003. "An Analysis on Anglo Saxon Corporate Governance Model Based on Islamic Perspective" dalam *ISEFID Review: Journal of The Islamic Economic Forum for Indonesian Development*, Vol. 2, No. 1, 2003, h. 25

³⁶ Khursid Ahmad. 2001. *op.cit.*, h. xx-xxi

dimensi moral dan sosial saja, tetapi juga memperkuat fondasi mikro dari ilmu ekonomi yang diperlukan untuk memungkinkan mereka memperkuat fondasi kerangka makro dan mencapai tujuan tujuan sosial.

Beliau meletakkan ilmu ekonomi Islam dalam posisi yang tidak terpisah dengan ilmu ekonomi konvensional. Beliau mengkaji persoalan-persoalan ekonomi dengan kaca mata Islam secara komprehensif untuk mendapatkan *view* baru ilmu ekonomi yang berkeadilan, peduli pada etika dan nilai-nilai spiritual. Kajian ini telah menjelaskan secara singkat tetapi padat dan tingkat tinggi tentang ilmu ekonomi Islam. Penjelasan tersebut bukan merupakan suatu survei dalam arti kata teknik, ia menghadirkan suatu pemandangan mengenai kontribusi utama terhadap ilmu ekonomi yang dibuat dari perspektif Islam oleh para ekonom Islam pada abad-abad lalu.

Buku ini telah memberikan kontribusi pendekatan-pendekatan baru untuk memahami masa lalu dan merencanakan masa depan. Pesan utama buku ini adalah bahwa ilmu ekonomi memerlukan pengayaan moral dari perspektif Islam sehingga ia benar-benar berguna untuk umat manusia dalam mencari tatanan dunia yang lebih adil. Dengan demikian, hadirnya ekonomi Islam merupakan jawaban terhadap ikhtiar menutup kekurangan dan kelemahan ekonomi konvensional, sehingga ekonomi Islam merupakan kelanjutan penyempurnaan dari perkembangan ekonomi konvensional.

PELUANG DAN TANTANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM

Perkembangan praktik ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan dan perbankan, baik di dunia maupun di Indonesia sangat menggembirakan. Di tingkat dunia, sudah banyak negara yang ada industri keuangan dan perbankan Syariah. Saat ini tidak kurang dari 75 negara di dunia telah mempraktekkan sistem ekonomi dan keuangan Islam, baik di Asia, Eropa, Amerika maupun Australia.

Demikian pula dalam bidang akademis, beberapa universitas terkemuka di dunia sedang giat mengembangkan kajian akademis tentang ekonomi syariah. Harvard University merupakan universitas yang aktif mengembangkan forum dan kajian-kajian ekonomi syariah ter-

sebut. Di Inggris setidaknya enam universitas mengembangkan kajian-kajian ekonomi syariah. Demikian pula di Australia oleh Mettwally dan beberapa negara Eropa seperti yang dilakukan Volker Nienhaus. Para ilmuwan ekonomi Islam, bukan saja kalangan muslim, tetapi juga non muslim.

Perkembangan praktik Ekonomi Islam di Indonesia juga menunjukkan fakta yang menggembirakan. Sejak sepuluh tahun terakhir, perkembangan diskursus Ekonomi Islam di Indonesia mendapatkan perhatian banyak kalangan, baik dari aspek konseptual/akademis maupun aspek praktik. Dari sisi akademis, perkembangan Ekonomi Islam ditandai dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang menawarkan program pelatihan maupun mata kuliah Ekonomi Islam, Keuangan Islam dan Perbankan Syariah baik pada tingkat Sarjana (S1) maupun tingkat Pascasarjana (S2 dan S3).

Pada tataran pendidikan formal terdapat Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,³⁷ SBI institute, SEBI, STEI Yogyakarta, Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta, UIN Syarif

³⁷ Di lingkungan UII, dalam rangka implementasi visi Universitas Islam Indonesia untuk menjadi universitas Islam berkualitas seperti universitas di negara-negara maju, dilahirkanlah Program Studi Ekonomi Islam FIAI UII tahun 2003/2004. Eksistensi Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntutan perkembangan zaman di masa mendatang yang ditandai oleh kemajuan teknologi yang sangat cepat serta tingginya tingkat turbulensi perubahan lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, membutuhkan kesiapan SDM yang 'paripurna' dari sisi jenjang akademik. SDM yang sedemikian itu ditandai oleh kemampuan analisis dan prediksi yang handal, dilatarbelakangi dengan bekal teoritis yang komprehensif dan disertai dengan integritas yang tinggi untuk mengembangkan disiplin ilmu yang ditekuninya. Berbekal pengalaman UII mengelola pendidikan tinggi lebih dari 65 tahun diharapkan program studi ini mampu menyediakan SDM professional di bidang ekonomi Islam. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Agama Islam pada masa itu (Prof. Dr. Arif Furqon), program studi Ekonomi Islam UII merupakan prodi Ekonomi Islam pertama kali yang mendapatkan izin operasional dari Departemen Agama RI untuk mengeluarkan ijazah sarjana ekonomi Islam (SEI) pada tahun 2003. Sebelum izin operasional diberikan, Dirjen Diktis Depag RI meminta UII untuk menyelenggarakan workshop kurikulum ekonomi Islam yang hasilnya akan menjadi pedoman untuk kurikulum prodi ekonomi Islam di Indonesia. Seiring dengan perkembangan praktik ekonomi Islam di Indonesia, setelah diadakan evaluasi terhadap kurikulum 2003, ternyata ditemukan kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan. Untuk itulah, prodi ekonomi Islam FIAI UII melakukan pembaharuan kurikulum pada tahun 2007 yang disempurnakan pada tahun 2009. Kurikulum baru telah betul-betul berupaya merespon perkembangan mutakhir praktik ekonomi Islam di Indonesia baik dalam industri dan bisnis keuangan Syariah. Sejak Maret 2009, telah terakreditasi B berdasarkan SK Nomor 001/BAN-PT/Ak-XII/S1/III/2009.

Hidayatullah Ciputat, UIN Yogyakarta, IAIN Medan, dan Fakultas Ekonomi UNAIR, STEI Tazkia, dan Jurusan Timur Tengah dan Islam UI serta upaya lain dari beberapa universitas Islam yang cukup banyak.

Pembangunan bidang pendidikan³⁸ mempunyai peran strategis sebagai salah satu faktor terwujudnya kehandalan Sumber Daya Manusia (SDM)³⁹ yang diperlukan sebagai salah satu modal dasar kesinambungan pembangunan nasional.⁴⁰ Oleh karena itu, pembangunan bidang pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun swasta.⁴¹ Lebih dari itu, perkembangan zaman di masa mendatang yang ditandai oleh kemajuan teknologi yang sangat cepat serta tingginya tingkat turbulensi perubahan lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, membutuhkan kesiapan SDM yang 'paripurna' dari sisi jenjang akademik.⁴² SDM yang sedemikian itu ditandai oleh kemampuan analisis dan prediksi yang handal, dilatarbelakangi dengan bekal teoritis yang komprehensif dan disertai dengan integritas yang tinggi untuk mengembangkan disiplin ilmu yang ditekuninya. Berbekal pada tekad ini diharapkan peranan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan nasional akan lebih meningkat.⁴³

Di samping itu, pembicaraan perkembangan Ekonomi Islam juga dilakukan melalui kegiatan pelatihan, seminar, simposium, konferensi, kajian buku dan kegiatan lain yang mengkaji lebih mendalam mengenai perkembangan Ekonomi Islam dan aplikasinya dalam

dunia ekonomi dan bisnis. Diantara lembaga pelatihan itu adalah; *Tazkia Institute*, *Shariah Economic and Banking Institute* (SEBI), Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Mandiri (PPSDM), Muamalat Institute, Karim Bussiness Consulting, dan Divisi Perbankan Syari'ah Institute Bankir Indonesia (IBI).

Dalam aplikasinya, perkembangan sistem Ekonomi Islam ditandai dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan Syariah yang didirikan seperti Perbankan Syariah, Baitul Mal Wat-Tamwil, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah dan lembaga-lembaga lain yang dijalankan dengan prinsip-prinsip Syariah. Semakin banyak lembaga-lembaga keuangan yang berasaskan prinsip-prinsip dasar Syariah memberikan alternatif yang lebih besar kepada masyarakat untuk menggunakan lembaga keuangan yang tidak berdasarkan sistem bunga (lembaga keuangan konvensional).

Mencermati perkembangan ekonomi Islam baik tingkat global maupun lokal yang semakin pesat tersebut, dalam konteks trend ekonomi era globalisasi, diperlukan suatu strategi yang lebih terarah dan jelas agar ekonomi Islam semakin mendapatkan tempat yang kokoh dalam perkembangan ekonomi masa depan, sehingga segera terwujudlah era ekonomi yang bermoral, berkeadilan, dan bertuhan. Berdasarkan situasi yang ada, strategi pengembangan Ekonomi Islam paling tidak perlu memperhatikan dua aspek mendasar yaitu aspek konseptual/akademis dan implementatif/praktis dari Ekonomi Islam. Pengembangan aspek konseptual lebih menekankan pada pengembangan Ekonomi Islam sebagai ilmu atau sistem, sedangkan pengembangan aspek implementatif menekankan pada pengembangan Ekonomi Islam yang diterapkan pada lembaga-lembaga bisnis yang menerapkan prinsip Syariah dalam menjalankan usahanya. Kedua aspek tersebut seharusnya dikembangkan secara bersama-sama sehingga mampu membentuk Sistem Ekonomi Islam yang dapat digunakan untuk menggali potensi dan kemampuan masyarakat (dunia dan Indonesia) membangun sistem ekonomi alternatif sebagai pengganti atau pelengkap sistem ekonomi konvensional yang sudah ada.

Pengembangan Ekonomi Islam terus diusahakan dengan melibatkan berbagai pihak baik secara individual maupun kelembagaan. Para pemikir terus mencoba menggali dan

³⁸ Untuk mengetahui bagaimana pola-pola pengembangan pendidikan di berbagai wilayah dunia, bisa dibaca buku I.N. Thut (1984) berjudul *Educational Patterns in Contemporary Societies*, diterjemahkan oleh SPA Teamwork dengan judul *Pola-pola Pendidikan Dalam Masyarakat Kontemporer*, diterbitkan Pustaka Pelajar tahun 2005.

³⁹ M. Enoch Markum (2007), *Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 4-5.

⁴⁰ Djohar (2006), *Pengembangan Pendidikan Nasional Menyongsong Masa Depan*. Yogyakarta: Grafika Indah, hlm. 5, 9 dan 98-104.

⁴¹ Jusuf Amir Faisal (1995), *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 49-50.

⁴² H.A.R Tilaar (2002), *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 2-10. Lihat juga Anita Lie (2004), "Pendidikan dalam Dinamika Globalisasi" dalam *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: PT Kompas, hlm. 217-225.

⁴³ Haidar Putra Daulay (2004), *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 133-135. Lihat juga Abuddin Nata (2003), *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 77-83.

membahas sistem Ekonomi Islam secara serius dan kemudian menginformasikannya kepada masyarakat baik melalui seminar, simposium, penulisan buku maupun melalui internet serta media yang lain. Di pihak para praktisi atau pelaku bisnis yang relevan juga terus memperbaiki dan menerapkan sistem Ekonomi Islam sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang dibolehkan dalam melaksanakan bisnis mereka. Dengan demikian pengembangan Ekonomi Islam diharapkan dapat sejalan antara konseptual dan praktik dalam bisnis sesuai dengan tuntunan yang ada yang pada akhirnya akan terbentuk sistem Ekonomi Islam yang betul betul sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Syariah yang digariskan.

Di pihak pemerintah, pengembangan Ekonomi Islam bisa dipacu dengan membuat undang-undang yang digunakan sebagai landasan formal dalam menjalankan kegiatan bisnis berdasarkan sistem Ekonomi Islam. Misalnya momentum dan fakta keunggulan bank Syariah dibanding bank konvensional di Indonesia pada akhir 2006. Akhir 2006 memberikan catatan fantastik tentang keunggulan sistem perbankan Islam yang merupakan salah satu aspek penting Syariat Islam dalam bidang ekonomi di banding perbankan konvensional. Hal ini terlihat dari perbandingan beberapa aspek performance operasi sistem perbankan meliputi Non Performing Loan/Financing (NPL/NPF), *Financing/Loan to Deposits Ratio* (FDR/LDR), simpanan bank di SBI atau SWBI, dan kinerjanya dalam menggerakkan sektor riil. Kenyataan ini mestinya bisa menjadi landasan bagi pemerintah untuk membuat regulasi yang menjadikan bank Syariah lebih dapat berkembang. Selain itu, fakta tersebut juga mestinya bisa "membuka" mata dan hati semua masyarakat muslim Indonesia khususnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk lebih bersungguh-sungguh menerapkan Syariat Islam dalam bidang ekonomi secara keseluruhan, karena bukti empiris tentang keunggulannya, khususnya dalam aspek perbankan sudah tidak terbantah lagi.⁴⁴

Pada dataran global, semakin banyak lembaga keuangan barat yang menawarkan berbagai produk keuangan syariah. Seperti yang dilakukan Citigroup, Deutsche Bank, HSBC,

Lloyds TSB dan UBS. Namun, pesatnya perkembangan keuangan syariah tersebut tidak diikuti penambahan jumlah sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang memadai. Belanda dan Rusia juga mengembangkan perbankan Syariah.

Mencermati fenomena tersebut, strategi pengembangan Ekonomi Islam tidak cukup dilakukan melalui pendidikan Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi. Bahkan materi dasar ekonomi Islam perlu mulai diajarkan di tingkat Sekolah Menengah, baik tingkat pertama maupun atas. Mata pelajaran ekonomi di sekolah menengah tersebut harus memasukkan sub bahasan ekonomi Islam dalam proses pembelajarannya. Dimasukkannya pelajaran Ekonomi Islam pada peringkat sekolah menengah, maka konsep dan karakteristik Ekonomi Islam dapat dikenalkan lebih dini sehingga masyarakat luas akan lebih mengenal dan memahami penerapan sistem Ekonomi Islam tersebut. Dengan demikian, pada tingkat perguruan tinggi, pengajaran ekonomi Islam tidak mulai dari tingkat yang sangat mendasar, langsung bisa menuju pada yang lebih *advance*, sehingga untuk mewujudkan SDM ekonomi Islam yang berkualitas akan lebih terjangkau.

Di antara tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan ekonomi Islam, di antaranya adalah belum banyaknya lembaga *funding* yang menyediakan dana riset maupun beasiswa bagi mahasiswa ekonomi Islam.⁴⁵ Oleh karena itu perlu ada upaya yang lebih terarah dan sistematis serta kreatif untuk menggali sumber-sumber dana alternatif agar dapat memenuhi kebutuhan untuk mendanai pengembangan pendidikan ekonomi Islam. Salah satu alternatifnya misalnya dengan memberdayakan institusi waqaf, zakat, infaq dan sedekah sebagai media pengumpulan *charitable fund* untuk kepentingan *maslahah ammah* umat Islam.

Abbas Mirakhor mengusulkan agar pendekatan dalam pengkajian ekonomi Islam (dalam institusi pendidikan) juga menggunakan pendekatan hermenetik. Pendekatan ini berbeda dengan tafsir, karena sifat hermenetik adalah *the process of extracting economic meaning from the first order interpretation*.⁴⁶ Dengan

⁴⁴ A Riawan Amin. 2006. "Reorientasi Kebijakan Perbankan", Artikel dalam HU nasional Republika, 4 Desember 2006.

⁴⁵ Abbas Mirakhor. 2007. *A Note on Islamic Economics*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, h. 23.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 18

pendekatan ini diperkirakan ekonomi Islam ke depan akan kaya dengan teori-teori ekonomi yang betul-betul berbasis al-Quran dan Sunnah.

Di antara tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan syariah. Hal tersebut terlihat dari belum banyaknya masyarakat yang mengakses layanan perbankan syariah dibandingkan layanan perbankan konvensional. Untuk itu diperlukan strategi sosialisasi yang lebih jitu kepada masyarakat. Bahkan kalau perlu diberlakukan bulan kampanye ekonomi Islam di masyarakat. Hal ini misalnya ditempuh dengan cara membangun kesepakatan semua takmir masjid di Indonesia untuk secara serentak tema khutbah jumat pada bulan tertentu adalah khusus bicara tentang ekonomi Islam. Jadi ada semacam gerakan nasional yang berporos di masjid sebagai sentra pendidikan umat dengan mengusung tema bulan ekonomi Islam.

PENUTUP

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi konvensional tidak hanya mempunyai kelemahan tetapi juga kelebihan-kelebihan. Kelemahannya terutama terletak kepada paradigma sekulernya yang memisahkan antara ekonomi positif dan nor-

matif, ketiadaan hubungan yang kokoh antara ekonomi mikro dan makro, pengabaian nilai-nilai moral dan etika dalam fungsi deskriptif dan prediktifnya. Kelebihannya adalah kepada *sophisticated*-nya pencapaian teori-teori ekonomi konvensional dengan model-model matematik dan kalkulus. Era globalisasi dan fenomena trend perkembangan ilmu ekonomi telah melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan, terutamanya dalam upaya pengembangan ekonomi Islam. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi Islam ke depan, selain perlu belajar dari kesuksesan dan kegagalan ekonomi konvensional, perlu juga memanfaatkan pendekatan-pendekatan baru yang kreatif dan inovatif untuk betul-betul dapat mewujudkan ekonomi Islam yang *rahmatan lil'alamin* dalam berbagai aspeknya. Di antaranya adalah melalui pendidikan ekonomi Islam, baik pendidikan formal maupun nonformal. Tentu yang diandalkan untuk dapat melahirkan SDM berkualitas dalam bidang ekonomi Islam adalah pendidikan formal, tidak hanya di perguruan tinggi, tetapi juga jenjang pendidikan di bawahnya. Mencermati perkembangan pendidikan ekonomi Islam sebagaimana paparan di atas, layaklah kita optimis bahwa pendidikan ekonomi Islam akan semakin siap dan memadai untuk melahirkan SDM berkualitas dalam bidang ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhamad Akhyar dan Muhamad. (2002). "Pengembangan Kurikulum Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi Agama Islam. Proceedings". *Symposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, h. 351.
- Ahmad, Khursid. (2001). "Kata Pengantar" dalam Umer Chapra (2001), *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam/The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Ikhwan Abidin Basri (terj.) Jakarta: Gema Insani Press
- Ali, Mohammad Daud. (1988). *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Anto, M.B. Hendrie. (2003). *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: EKONISIA
- Baldwin, R.W. (1966). *Social Justice*. London: Pergamon Press Joseph G. Eisenhauer, "Economic Models of Sin and Remorse: Some Simple Analytics", *Review of Sosial Economy*, Vol. LXII, No. 2, June 2004
- Boulakia, David Jean C. (1971). "Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist", *Journal of Political Economy*, Vol. 79, No. 5 (September/October), The University of Chicago.

- Buarque, Christofam. (1993). *The End of Economics: Ethics and Disorder of Progress*. London, Zed Books
- Chapra, M. Umar. (2001). *What is Islamic Economics*, Jeddah: IRTI – IDB.
- Choudoury, Masudul Alam. (1989). *The Paradigm of Humanomics*. Bangi: UKM
- Effendi, Rustam. (2003). *Produksi dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Etzioni, Amitay. (1988). *The Moral Dimension: Towards a New Economics* (New York: McMillan
- Gorringer, Timothy. (1999). *Fair Shares: Ethics and The Global Economy*. Slovenia: Thames & Hudson
- Gregory, Paul R dan Robert C Stuart. (1981). *Comparative Economic System*, Boston: Houghton Mifflin Company
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hakim, Arif Rahman. (2004). “Meninjau Ulang Aspek Humanisme dalam Teori Ekonomi”, dalam *Jurnal Balairung*, Edisi 37, XVIII, 2004
- Hamilton, Clive. (1994). *The Mystic Economist*. Australia: Hamilton
- Khan, Muhammad Akram. (1989). “Methodology of Islamic Economics” dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications
- Koslowski, Peter. (1993). “The Business of Business is Ethical Business” dalam Peter Koslowski dan Shionoya (1993), *The Good and The Economical, Ethical Choice in Economics and Management*. London: Springer-Verlag
- Leimgruber, Walter. (2004). *Between Global and Local*, Aldershot (England): Ashgate Publishing Limited
- Mannan, M. Abdul. (1986). *Islamic Economics, Theory and Practice*. Cambridge: Hodder and Stoughton, The Islamic Academy
- Manzoor, S. Parvez. (2004). “Book Review ‘Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity’ oleh Johan Meuleman (ed.) (2002), London: RoutledgeCurzon, dimuat dalam *Journal of Islamic Studies*, Vol. 15, No. 2, Mei 2004, Oxford: Oxford Centre for Islamic Studies, h. 280.
- Mirakhor, Abbas. (2007). *A Note on Islamic Economics*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Moten, Abdul Rashid. (2005). “Modernization and The Process of Globalization: The Muslim Experience and Responses”, dalam K.S. Nathan dan Mohammad Hashim Kamali (eds.), *Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategic Challenges for the 21st Century*, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, hh. 231-255.
- Mubyarto. (2002). “Penerapan Ajaran Ekonomi Islam Di Indonesia” dalam *Jurnal Ekonomi Pancasila*, Th. I - No. 1 - Maret 2002, [http://www.ekonomirakyat.org/edisi 1/artikel 4.htm](http://www.ekonomirakyat.org/edisi%201/artikel%204.htm)
- Pronk, Jan. (2001). “Globalization: A Developmental Approach”, dalam Jan Nederveen Pieterse (ed.), *Global Futures, Shaping Globalization*, London: Zed Books
- Rose, Collin dan Malcolm J. Nicholl. (1997). *Accelerated Learning for the 21st Century*. New York: Delacorte Press
- Rothschild, Kurt W. (1993). *Ethics and Economic Theory*. Cambridge: Edward Elgar

- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. (1991). "Islamic Economic Thought: Foundations, Evolution and Needed Direction", dalam AbulHasan M. Sadeq *et al.* (eds.), *Development and Finance in Islamic*, Petaling Jaya: International Islamic University Press.
- Syarif, Djohan. (2002). "Prospek, Tantangan dan Bagaimana Mengajarkan Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi", dalam Adnan dan Muhamad, dalam *Proceedings Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Wafa, Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam *et al.*, (2005). *Pengantar Perniagaan Islam*, Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Bhd.
- Yahya, Rizal. (2003). "An Analysis on Anglo Saxon Corporate Governance Model Based on Islamic Perspective" dalam *ISEFID Review: Journal of The Islamic Economic Forum for Indonesian Development*, Vol. 2, No. 1, 2003
- Zajac, Edward E. (1995). *Political Economy of Fairness*. London: MIT Press
- Zarqa', Anas. (1989). "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare", dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications.